

**TINJAUAN HUKUM ATAS MEKANISME PERLINDUNGAN PENGGUNA
CRYPTOCURRENCY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK)**

***LEGAL REVIEW OF THE CRYPTOCURRENCY USER PROTECTION
MECHANISM ACCORDING TO LAW NUMBER 4 OF 2023 ON THE
DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF THE FINANCIAL SECTOR
(PPSK LAW)***

TESIS

Oleh:

JERRY PERYANTO, S.H.

2302190023



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**TINJAUAN HUKUM ATAS MEKANISME PERLINDUNGAN PENGGUNA
CRYPTOCURRENCY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK)**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

TESIS

Oleh:

JERRY PERYANTO, S.H.

2302190023



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jerry Peryanto, S.H.

NIM : 2302190023

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Hukum Atas Mekanisme Perlindungan Pengguna *Cryptocurrency* Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari Kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 12 Juni 2025



Jerry Peryanto, S.H.
NIM. 2302190023



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI UKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“TINJAUAN HUKUM ATAS MEKANISME PERLINDUNGAN PENGGUNA
CRYPTOCURRENCY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK)”**

Oleh:

Nama : Jerry Peryanto, S.H.

NIM : 2302190023

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2025

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Diana R.W. Napitupulu, SH.,MH.,MKn.,Msc.,
NIP/NIDN: 171444/0305046406

Dr. Paltiada Saragi, SH.,MH.,
NIP/NIDN: 191691/0330106505

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, SH., MH.,
NIP/NIDN: 191691/0305097105

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN : 001473/0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI UKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

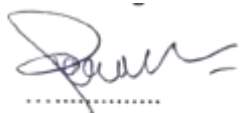
Nama : Jerry Peryanto, S.H.

NIM : 2302190023

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ATAS MEKANISME PERLINDUNGAN PENGGUNA CRYPTOCURRENCY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK)”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Diana R.W. Napitupulu, SH.,MH.,MKn.,Msc.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Paltiada Saragi, SH., MH.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH., MH.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 12 Juni 2025



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI UKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jerry Peryanto, S.H.

NIM : 2302190023

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ATAS MEKANISME
PERLINDUNGAN PENGGUNA CRYPTOCURRENCY
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU PPSK)"**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain, maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya mennberikan Hak Non eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 12 Juni 2025



Jerry Peryanto, SH.
NIM. 2302190023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar magister hukum pada Universitas Kristen Indonesia (UKI). Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu. Dr. Diana Ria W. Napitupulu S.H., M.H., M.Kn, M.Sc., selaku pembimbing materi 1 yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta masukan-masukan yang berharga untuk mengarahkan saya dalam penyusunan dan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Paltiada Saragi S.H., M.H., selaku pembimbing materi 2 yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta masukan-masukan yang berharga untuk mengarahkan saya dalam penyusunan dan penulisan tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Ibu. Prof. Dr. dr Bernadetha Nadeak, M.Pd., selaku Direktur program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).

3. Bapak Dr. Paltiada Saragi S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. Ibu. Dr. Diana Ria W. Napitupulu S.H., M.H., M.Kn., M.Sc., dan Bapak Dr. Paltiada Saragi S.H., M.H., selaku pembimbing 1 dan 2 pada Ujian Penelitian Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H, M.H., selaku penguji pada ujian penelitian sidang tesis, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya tesis ini
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan tesis ini.

Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua Lukas Napitupulu (Alm) dan Asdelina Sarifa Panjaitan serta seluruh keluarga besar staf “JERYS NAPITUPULU & Co” yang memberikan doa, dukungan dan semangat yang sangat berharga dan terkhususnya kekasih saya “AGATHA WILONA AYU KAULIKA., SH., MKN,.” yang telah membantu memberikan bahan tesis dan masukan dalam penulisan tesis ini serta teman – teman kuliah satu Angkatan kelas C tahun 2023 yang telah memberikan warna dan semangat pertemanan dan saling mendukung untuk terselesaikannya perkuliahan dengan baik dan benar.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat terhadap pengguna *cryptocurrency* di Indonesia dan perkembangan aturan hukum pada sektor keuangan berbasis teknologi dan demikian juga bagi dunia akademis serta praktisi di bidang hukum khususnya kemajuan dalam praktisi aturan hukum *cryptocurrency* di Indonesia dan global.

Jakarta, 12 Juni 2025



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	10
F. Metode Penelitian.....	26
G. Orisinalitas Penelitian.....	32
H. Novelty Penelitian.....	36
I. Sistematika Penulisan	37
BAB II	39
TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Kerangka Teori.....	39
B. Kerangka Konseptual	50
BAB III.....	77
MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA <i>CRYPTOCURRENCY</i> DI INDONESIA.....	77
A. Praktik <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	77

B. Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	84
BAB IV	107
PERAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP AKTIVITAS <i>CRYPTOCURRENCY</i> MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN GUNA MELINDUNGI HAK-HAK PENGGUNA DI INDONESIA	107
A. Konstitusionalitas Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Penyidik Tunggal Sektor Keuangan Pasca UU PPSK	107
B. Peran dan Kewenangan OJK Dalam Melakukan Pengawasan Kepada Pengguna <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	112
C. Peran dan Kewenangan Bappebti Dalam Melakukan Pengawasan Kepada Pengguna <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	138
BAB V	154
PENUTUP	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	157

ABSTRAK

Judul Tesis: **Tinjauan Hukum Atas Mekanisme Perlindungan Pengguna *Cryptocurrency* Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan**

Kata Kunci: Mekanisme Perlindungan; *Cryptocurrency*, UU PPSK

Perkembangan pesat teknologi digital telah membawa perubahan dalam sektor keuangan, termasuk munculnya *cryptocurrency* sebagai salah satu bentuk inovasi dalam sistem pembayaran dan investasi. Di Indonesia, tren ini memunculkan berbagai tantangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kepastian regulasi, serta efektivitas pengawasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap risiko serta potensi yang ditawarkan oleh aset digital, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency*. Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* di Indonesia telah diakomodasi dalam UU PPSK.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PPSK merupakan langkah awal yang penting dalam meletakkan dasar hukum bagi pengawasan sektor keuangan digital di Indonesia, termasuk terhadap aset kripto. Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah *cryptocurrency*, sejumlah ketentuan dalam UU PPSK memberikan legitimasi bagi OJK untuk menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital. Keberadaan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 juga memperkuat posisi OJK dalam mengatur penyelenggaraan aset digital secara teknis dan substantif. Di sisi lain, peran Bappebti masih penting dalam mengatur pasar fisik aset kripto melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang menyentuh aspek kelembagaan, teknis, dan edukatif. Kedua lembaga ini, meskipun bekerja secara paralel, menunjukkan komitmen yang kuat dalam membentuk ekosistem kripto yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan masih mengemuka, terutama dalam masa transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK, belum adanya definisi hukum eksplisit tentang aset kripto, serta minimnya regulasi substantif mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan mekanisme kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, pembentukan undang-undang khusus tentang aset digital, serta peningkatan literasi masyarakat guna menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif, berkeadilan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan global.

Kata Kunci: Mekanisme Perlindungan; *Cryptocurrency*, UU PPSK

ABSTRACT

Thesis Title: *Legal Review of the Cryptocurrency User Protection Mechanism According to Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector*

Keywords: *Protection Mechanism; Cryptocurrency, PPSK Law*

The rapid development of digital technology has brought changes in the financial sector, including the emergence of cryptocurrencies as a form of innovation in payment and investment systems. In Indonesia, this trend raises various legal challenges related to consumer protection, regulatory certainty, and the effectiveness of supervision. This research is motivated by the urgent need for an adaptive and responsive legal framework to the risks and potentials offered by digital assets, especially in the context of legal protection for cryptocurrency users. The main issue examined in this study is the extent to which legal protection for cryptocurrency users in Indonesia has been accommodated in the PPSK Law.

This research is a normative legal research using a legislative approach and a conceptual approach. The data sources used in this study are secondary data obtained from laws and regulations, legal literature, scientific journals, and official documents. The data collection technique is carried out through literature study, while the data analysis technique used is qualitative analysis.

The results of the study show that the PPSK Law is an important first step in laying the legal basis for the supervision of the digital financial sector in Indonesia, including crypto assets. Although it does not explicitly mention the term cryptocurrency, a number of provisions in the PPSK Law provide legitimacy for the OJK to carry out the function of supervision and consumer protection in digital financial services. The existence of OJK Regulation Number 27 of 2024 also strengthens the OJK's position in regulating the implementation of digital assets technically and substantively. On the other hand, the role of Bappebti is still important in regulating the physical market of crypto assets through Bappebti Regulation Number 5 of 2019 which touches on institutional, technical, and educational aspects. These two institutions, while working in parallel, demonstrate a strong commitment to forming a secure, transparent, and sustainable crypto ecosystem. However, challenges still arise, especially during the transition of supervision from Bappebti to OJK, the absence of an explicit legal definition of crypto assets, and the lack of substantive regulations regarding the responsibilities of business actors and compensation mechanisms. Therefore, it is necessary to strengthen derivative regulations, establish special laws on digital assets, and increase public literacy to create a legal protection system that is comprehensive, fair, and adaptive to global financial technology developments.

Keywords: *Protection Mechanism; Cryptocurrency, PPSK Law*